

BAB III

ORGANISASI KOALISI ANTI TERORIS : *ISLAMIC MILITARY COUNTER TERRORISM COALITION (IMCTC)*

Pada Bab III ini akan membahas tentang adanya organisasi yang beranggotakan negara – negara Islam di wilayah Asia dan Afrika dalam melawan terorisme. Organisasi – organisasi regional maupun internasional dapat berdiri karena memiliki visi misi sesuai kebutuhan negara anggotanya. Dalam menghadapi krisis keamanan negara atau isu terorisme tidak sedikit organisasi yang memiliki visi untuk melawan adanya terorisme di berbagai wilayah.

United Nations adalah salah satu organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, yang dilakukan oleh UN adalah berupaya untuk mencegah konflik dan menyelesaikannya (United Nations , t.thn.). Kemudian, *The Gulf Cooperation Council (GCC)* adalah salah satu organisasi yang berisikan anggota negara – negara di wilayah timur tengah seperti Arab Saudi, melihat bahwa negara – negara di kawasan teluk memiliki krisis terhadap keamanan regional yang tidak stabil, memiliki kebijakan untuk membuat kerjasama di bidang militer (Global Security.org, t.thn.). *African Union* adalah salah satu organisasi yang anggotanya terdiri dari negara di wilayah Afrika Tengah, Afrika Timur Afrika Utara Afrika Selatan dan Afrika Barat. Salah satu visinya yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan benua (African Union Peace and Security, 2014).

A. Latar Belakang Pendirian

Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) adalah salah satu koalisi anti Teroris yang digagas oleh Arab Saudi yaitu Mohammad bin Salman Al Saud, yang bertepatan pada tanggal 14 Desember 2015, melihat dari peristiwa konflik

internal di dalam negara Yaman yang melawan kelompok Syiah Al Houthi. Pada tahun 2004 kelompok ini melakukan demonstrasi anti pemerintah yang mengkritik kerjasama pemerintah dengan Amerika Serikat dalam hal melawan adanya krisis terorisme, tetapi pemerintah menurunkan kebijakannya untuk menangkap pemimpin Houthi yaitu Hussein Badr Ad-Din Al-Houthi (Ghafur, 2015).

Kemudian, konflik berkelanjutan dengan adanya protes masyarakat Yaman pada tanggal 18 Agustus 2014, protes ini serangkaian demonstrasi Houthi di Sana'a yang menolak kenaikan harga BBM. Pada tanggal 21 September 2014, kelompok Houthi mengambil alih kendali Sana'a. Kemudian Perdana Menteri Mohammad Basindawa mengundurkan diri dan Houthi menandatangani sebuah kesepakatan untuk pembentukan pemerintah bersatu yang baru dengan partai – partai politik lainnya. Protes tersebut ditandai dengan adanya pertentangan antara Houthi dengan pemerintah (Lembaga Kajian Syamina, 2015).

Pada tahun 2015 Rabbo Mansour Hadi berkunjung ke Arab Saudi dengan maksud meminta bantuan Arab Saudi dalam melawan kelompok Houthi. Akhirnya Arab Saudi ini mengumpulkan koalisi untuk menyerang kelompok Houthi. Negara regional lainnya juga ikut terlibat dalam operasi Arab Saudi, seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar dan Bahrain dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh *the Saudi Press Agency* untuk melindungi Yaman dan masyarakatnya dari agresi militer Houthi yang juga dikendalikan oleh kekuatan darimpihak asing dalam mencapuri keamanan dan stabilitas persaudaraan di Yaman. Mesir juga mengumumkan dukungan politik dan militernya untuk Yaman, Mesir dan Arab Saudi berkoordinasi dalam gabungan pasukan militer udara dan laut (The Associated Press : CBC News, 2015).

Selain itu, kekejaman dari kelompok Boko Haram yang telah dikonfirmasi membantai kurang lebih dari 2.000 orang

pada 3 Januari 2015, kepala distrik Baba Abba Hassan mengatakan sebagian besar korban adalah anak-anak, wanita dan orang tua yang tidak bisa berlari cukup cepat ketika pemberontak melaju ke Baga, menembakkan granat berpeluncur roket dan senapan menyerbu kepada penduduk kota. Pihak pemerintah telah mengirim pasukan keamanan dan merespon dengan cepat, pemerintah mengerahkan aset militer yang signifikan dan melakukan serangan udara terhadap target militan (agencies, 2015).

Melihat dari peristiwa terorisme di wilayah Timur Tengah dan Afrika, menyebabkan Arab Saudi menginisiasi pembentukan organisasi untuk melawan teroris. Aliansi Islam anti teroris ini adalah salah satu kerjasama dan koordinasi militer yang ke tiga. Pada tahun 2013, Arab Saudi mendorong struktur komando terpadu seperti NATO yaitu *The Gulf Cooperation Council* (GCC) yang khusus di bagian pasukan militer kurang lebih memiliki 100.000 tentara, pada tahun 2014 GCC atau GCC – pol menambah pasukannya dengan memasukan polisi dan angkatan laut sebagai tim keamanan.

Pada tahun 2015 Arab Saudi bekerjasama dengan Mesir membentuk pasukan anti teror yang dibawah naungan *the League of Arab States* dan memiliki 40.000 tentara. Setelah adanya deklarasi dan beberapa pertemuan kepala pemerintahan anggota organisasi ini, proyek ini telah ditunda sejak musim panas 2015. Kemudian tidak adanya pertemuan langsung mengenai masalah prioritas strategi antara Mesir dengan negara Kuwait dan Bahrain sebagai negara di bagian Teluk. Pada 2015 Amerika Serikat secara terbuka mengesampingkan pakta pertahanan timbal balik dengan negara-negara Teluk dengan alasan bahwa membangun struktur seperti NATO akan membutuhkan waktu puluhan tahun (Gaub, Saudi Arabia and the Islamic alliance , 2016).

Arab Saudi mendeklarasikan melawan teroris setelah terjadinya peristiwa pemboman dan penembakan yang terjadi di

Masjid Al- Rawdah di Sinai Utara, Mesir setelah shalat Jumat. Serangan ini menewaskan lebih dari 300 orang (Hidayatulloh.com, 2017). Pada bulan Desember 2015 kerajaan Arab Saudi mengumumkan pembentukan *Islamic Military Counter Terrorism Coalition* atau disingkat menjadi IMCTC untuk membentuk *pan-Islamic front against terrorism*.

Perwakilan dari negara – negara Islam mengadakan pertemuan di Riyadh pada bulan Maret 2016 untuk menegaskan kembali bahwa latar belakang dibentuknya koalisi ini untuk mengintensifkan upaya dalam memerangi terorisme melalui kerja bersama sesuai dengan kemampuan mereka, berdasarkan keinginan masing – masing negara anggota untuk berpartisipasi dalam operasi atau program sesuai kebijakan dan prosedur IMCTC tanpa mengorbankan kedaulatan negara – negara anggota koalisi. Pada pertemuan perdananya di Riyadh, Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman mengikrarkan untuk membasmi teroris dari wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Pertemuan pertama ini menghasilkan Blue Print dari strategi operasi koalisi (The Royal Embassy of Saudi Arabia in Rome, 2017).

B. Anggota IMCTC

Arab Saudi, Pakistan dan Mesir adalah salah satu negara Anggota yang memiliki pasukan besar dan kekuatan militer yang cukup kuat di Timur Tengah, Mesir memiliki 1.329,250 tentara militer, Pakistan yang memiliki 919.00 tentara militer dan Arab Saudi memiliki 256.000 tentara militer. Mesir di urutan ke 12 dari 136 negara dalam *Global Firepower review* melihat dari *Power Index* nya 0.2565, kemudian ada Pakistan di urutan ke 17 dari 136 negara dalam *Global Firepower review* melihat dari *Power Index* nya 0.3689, setelah itu ada Arab Saudi di urutan ke 26 dari 136 negara dalam *Global Firepower review* melihat dari *Power Index* nya 0.4636. keterangannya adalah skor yang lebih rendah adalah yang terbaik di indeks GFP (GFP - World Military Strength, 2018).

Tiga negara ini memiliki visi yang sama dalam menghadapi terorisme di wilayah Timur Tengah, akhirnya dengan inisiasi dari Arab Saudi membentuk IMCTC anggota yang tergabung sampai 2018 adalah 41 negara dari wilayah Asia dan Afrika. Libya dan Yaman adalah salah satu negara yang ikut bergabung dengan koalisi karena negaranya dilanda perang dengan militer. Negara-negara Afrika yang telah menderita serangan militan seperti Mali, Chad, Somalia dan Nigeria juga menjadi anggota (NBC News, 2015).

Turki adalah satu – satunya negara yang bergabung dengan aliansi ini yang juga anggota dari NATO (Today's Zaman, 2015). Negara-negara Teluk seperti UEA, Bahrain, Qatar dan Kuwait juga ikut bergabung (The National News, 2015). Oman yang menentang upaya negara-negara Teluk Arab untuk menutup barisan melawan Iran, telah bergabung dengan koalisi negara-negara Muslim yang dipimpin Saudi untuk memerangi terorisme (Reuters, 2016). Malaysia ikut bergabung dengan koalisi ini dianggap karena memiliki peran penting dalam aliansi ini (Wagner, 2017).

Negara Azerbaijan dan Tajikistan dikonfirmasi ikut bergabung dengan koalisi IMCTC agar dapat mempelajari cara untuk memerangi terorisme (Youssef, 2015). Kemudian ada Islamic Republic of Afghanistan, Republic of Benin, Burkina Faso, Brunei Darussalam, Union of the Comoros, Republic of Côte d'Ivoire, Republic of Djibouti, Republic of Gabon, Republic of The Gambia, Republic of Guinea, Republic of Guinea-Bissau, Hashemite Kingdom of Jordan, Republic of Lebanon, Republic of Maldives, Islamic Republic of Mauritania, Kingdom of Morocco, Federal Republic of Nigeria, State of Palestine, Republic of Sierra Leone, Republic of Senegal, Republic of Sudan, Republic of Togo, Republic of Tunisia and Republic of Uganda (The Islamic Military Counter Terrorism Coalition . Member Countries, 2017)



Gambar 3. 1 Peta Negara Anggota
(The Islamic Military Counter Terrorism Coalition, 2017)

C. Ruang Lingkup IMCTC

IMCTC adalah organisasi kerjasama yang transparan dan suatu koalisi negara – negara yang berpartisipasi dalam upaya memerangi terorisme dan IMCTC ini juga berupaya berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk melawan terorisme. Pusat Penanggulangan Terorisme (CTC) atau markas besar dari organisasi ini berada di Riyadh bekerja untuk merumuskan tindakan – tindakan agar terorganisasi dalam kemampuan anti teroris. Kegiatan ini dapat meliputi berbagai inisiatif untuk penanggulangan terorisme yaitu Ideologi, Komunikasi, Pendanaan Penanggulangan Terorisme (CTF) dan Militer (The Islamic Military Counter Terrorism Coalition. Media Center, 2017)

1. Ideologi

Meluncurkan dan mempertahankan kehidupan kedepannya agar menjadi lebih baik untuk generasi mendatang, berakar pada pesan yang konsisten dan

terarah untuk dijadikan prinsip hidup. Menegaskan kembali prinsip – prinsip Islam tentang pemahaman toleransi dan kasih sayang, bahwa Islam yang sesungguhnya mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan individual maupun kelompok, kemudian adanya perlawanan terhadap narasi ideologi ekstremis brutal dengan menghadirkan sifat Islam yang sejati serta mendukung ideologis, reformasi psikologis dan sosial.

Salah satu cara untuk melawan terorisme adalah memperkuat persepsi ideologi dalam menghadapi ekstremisme dan terorisme, kemudian akan adanya tindakan untuk mengekspos penyalahgunaan ekstremis dalam membuat teks dan peristiwa bahwa yang dilakukan oleh kelompok ini salah. Para menteri atau anggota yang hadir dalam pertemuan perdana di Riyadh ini menyadari adanya obsesi pada kelompok teroris atau ekstremisme ideologis ini berbahaya yang untuk disebarkan dan akan memberikan dampak yang buruk bagi psikis individu maupun kesejahteraan masyarakat.

Adanya ilmu pendidikan khusus dalam mengatasi terorisme, salah satunya adalah memperdalam bagaimana konsep – konsep Islam yang benar, bagaimana menegakkan kebenaran Islam moderat dan mempelajari keharusan konsisten bagi umat muslim dalam menjaga nilai – nilai Islam, serta mempelajari betapa pentingnya hidup berdampingan secara damai dan adil dengan komunitas global yang menjamin keamanan dan kemakmuran.

Pada intinya jalur ideologis dalam koalisi ini merupakan elemen penting dalam pertempuran ini. Dengan menggunakan ideologi akan menyentuh ekstremisme. Ini merupakan konflik nyata dalam mengalahkan dan mengatasi terorisme, karena

terorisme tidak didasarkan pada kepentingan politik atau militer, tetapi lebih didasarkan pada ideologi ekstremis

2. Komunikasi

Mengembangkan, memproduksi dan menyebarkan konten faktual, ilmiah dan menarik pada komunikasi dan platform dalam saluran media yang dimiliki oleh koalisi atau pihak ketiga, dengan tujuan untuk merusak daya tarik terorisme keras, kemudian menanamkan harapan dan optimisme serta mengukur dampak pada pola pikir dan perilaku.

Media dalam zaman kontemporer ini sangat berperan penting untuk merangkul saluran dan mengungkap agenda yang akan dioperasikan oleh teroris. Bekerjasama dengan media untuk melawan propaganda teroris dan menghancurkan fondasinya agar dapat mengurangi pengaruhnya. Melihat bahwa tindakan terorisme menyebabkan dampak negatif yang serius dan tidak mudah untuk menanggulaginya maka dalam ruang lingkup komunikasinya IMCTC dan media akan berusaha untuk mencegah para teroris menyampaikan pesan mereka menggunakan media.

Pemberdayaan media sangat penting untuk melawan ideologi ekstremis dari sumber apapun, seperti melawan propaganda teroris, simbol pemikiran ekstremis dan mengekspos metode yang digunakan untuk mempromosikan ide – ide yang menyimpang. IMCTC dan media ini juga berkomitmen untuk mengarahkan upaya media untuk menunjukkan sifat asli dari teroris dan mengungkapkan bahwa yang dilakukan oleh teroris ini menyerukan kematian dan kehancuran, dan membongkar mekanisme untuk propagasi atau

penyebaran virus yang negatif. Dalam domain ini juga menekankan pentingnya berinvestasi dalam platform media digital agar dapat meningkatkan kesadaran di antara anggota masyarakat dan mencegah mereka dari menyerah pada pesan teroris.

3. Pendanaan Penanggulangan Terorisme (CTF)

Untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan otoritas negara – negara kompeten dalam *Counter Terrorist Financing* (CTF). Kemudian untuk mempromosikan praktek yang baik, memajukan kerangka hukum, peraturan dan operasional, juga untuk memfasilitasi pertukaran informasi dalam mendukung operasi pencegahan, deteksi dan penyitaan terkait barang dan pendanaan biaya yang dikeluarkan oleh teroris.

Negara anggota IMCTC ini juga menekankan untuk memberhentikan dan berkomitmen untuk tidak memberika sumber pendanaan teroris dan memotong segala dukungan keuangan untuk operasi dan kegiatan teroris. Upaya yang dilakukan adalah mempercepat tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk melawan terorisme dalam domain ini agar dapat menghentikan sumber atau pemasukan secara permanen.

Harus ditegakkannya kebijakan moneter, perundang-undangan dan kontrol keuangan. Serta meningkatkan kepatuhan agar selaras dengan standar internasional. Kemudian adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama teknis keamanan dalam pertukaran data dan informasi, dan adanya transfer pengetahuan dan keahlian di bidang-bidang yang difokuskan pada upaya memerangi pendanaan terorisme. Hal yang penting juga memastikan

kecukupan dan efektivitas sistem dan juga prosedur untuk memblokir pendanaan teroris.

4. Militer

Memfasilitasi ketika adanya konflik atau peristiwa yang disebabkan oleh kelompok teroris, juga dalam mengkoordinasi pengadaan dan perencanaan operasi militer negara anggota, adanya fasilitas pembagian informasi militer yang aman dan dorongan peningkatan kapasitas penanggulangan teror dan peningkatan kemampuan militer untuk mencegah agresi serta kekerasan.

Pentingnya peran militer dalam melawan adanya ancaman terorisme, meningkatkan keamanan dan perdamaian di negara – negara anggota. Kemudian berkontribusi pada keamanan dan perdamaian regional dan internasional. Ketika tersedianya kemampuan militer untuk melemahkan atau menyeimbangi kekuatan terorisme yang cukup pasif menyerang negara – negara yang sudah di targetkan.

Dalam strategi, partisipasi negara – negara akan ditentukan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing negara, serta sesuai dengan keinginan masing-masing negara untuk berpartisipasi dalam operasi militer tertentu. Kemudian salah satu peran koalisi ini dibentuk adalah pentingnya koordinasi dan mengintegrasikan upaya militer seperti pertukaran informasi dan intelijen serta mengadakan pelatihan bersama.

Keempat domain ini akan menjadi ruang lingkup atau langkah dalam mencapai tujuan organisasi untuk melawan terorisme, melawan ideologi teroris dan ekstremis brutal. Kemudian adanya upaya kesadaran untuk menyebarkan dan

mepromosikan pesan yang konsisten dalam menegaskan kembali prinsip toleransi. Adanya pembentukan mitra strategis regional maupun internasional untuk memperkuat kolaborasi yang mampu melawan teroris. Prinsip sesungguhnya dalam melawan terorisme membutuhkan upaya kolektif, terpadu dan kerja yang konsisten untuk melemahkan dampak dari ancaman teroris (The Islamic Military Counter Terrorism Coalition. IMCTC Message, 2017)

Berjalannya empat ruang lingkup ini akan dikepalai oleh perwakilan yang telah dipilih, yaitu :

- a. *Ideology* - Dr. Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa, *Secretary General of the Muslim World League.*
- b. *Communications* – Dr. Mohammad Al Momani, *Jordanian Minister of State for Media Affairs and Communications.*
- c. *Counter-terrorist Financing* – Dr Ahmed al-Kholifey, *Governor of the Saudi Central Bank.*
- d. *Military* – Gen. Raheel Sharif, *Military Commander IMCTC*

D. Tujuan dibentuknya IMCTC

Dalam setiap dibentuknya suatu organisasi ataupun koalisi tentunya akan memiliki visi yang sama sebagai alasan suatu negara ikut berpartisipasi. Agar rencana perlawanan terhadap teroris terstruktur maka IMCTC memiliki tujuan operasi koalisi ini dibentuk (The Royal Embassy of Saudi Arabia in Rome, 2017).

Pertama yaitu memperkuat kontribusi dari negara – negara Islam terhadap keamanan dan perdamaian global dan melengkapi upaya dalam penanggulangan terorisme internasional. Pada Maret 2016 adanya pembentukan dan pelatihan militer di *Northern Thunder* yang di pandu oleh Arab

Saudi, lebih dari 300.000 tentara dan lebih dari 2.000 pesawat tempur ikut berpartisipasi.

Kedua yaitu, memperkuat solidaritas dan kolaborasi di antara negara – negara anggota koalisi untuk membentuk persatuan melawan organisasi – organisasi teroris dan upaya mereka untuk menghancurkan keamanan dan mengubah citra Islam dan Muslim, karena munculnya Islamophobia disebabkan oleh kelompok – kelompok yang menyerang suatu wilayah dengan mengklaim bahwa yang dilakukan adalah halal dan perintah dari Tuhan.

Ketiga, mengubah persepsi ideologi radikal di negara – negara anggota koalisi melalui kampanye komunikasi strategi untuk membantah narasi dan propaganda radikal dan ekstremis.

Keempat, menegaskan kembali nilai – nilai moderat Islam dan prinsip – prinsip perdamaian, toleransi dan kasih sayang. Memberikan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang selalu mengedepankan perdamaian.

Kelima yaitu, memerangi adanya pendanaan terorisme dengan bekerjasama dengan anggota koalisi dan otoritas Counter Terrorist Financing (CTF), kemudian untuk mempromosikan kepatuhan pada perjanjian internasional dan memajukan kerangka kerja hukum, peraturan dan operasional.

Kemudian yang terakhir yaitu membangun kemitraan strategi antara negara – negara anggota, negara – negara pendukung dan organisasi internasional untuk berbagi informasi dan keahlian anti terorisme.

E. Prinsip – prinsip Strategis IMCTC

Selain itu juga IMCTC memiliki prinsip – prinsip strategis, yaitu (The Royal Embassy of Saudi Arabia in Rome, 2017) :

1. Legitimasi : Mengakui legitimasi pan-Islam dari koalisi yang memiliki rasa hormat dan dukungan dari komunitas internasional.
2. Lokalisasi : Memungkinkan solusi regional dan lokal yang sesuai dengan budaya untuk melawan terorisme.
3. Sumber Daya : Memfasilitasi kontribusi negara - negara anggota untuk pendanaan inisiatif, berdasarkan kemampuan mereka.
4. Agility : Beroperasi dengan cara yang efisien, dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan cepat
5. Kemitraan : Bermitra dengan organisasi CT eksternal dan negara-negara sahabat untuk meningkatkan dampak.
6. Kolaborasi : Penekanan pada prinsip koordinasi dan kerja sama antara Negara-negara Anggota, Negara-negara pendukung dan organisasi internasional.
7. Partisipasi : Libatkan negara-negara anggota dalam proses perencanaan koalisi.
8. Tujuan Bersama : Menyelaraskan pada mandat koalisi dan tujuan strategis.
9. Kedaulatan : Penekanan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara Anggota dan independensi hukum dan peraturan mereka.

F. Sistem Operasional

Saat ini koalisi IMCTC dipimpin oleh Raheel Sharif sebagai sekretaris jenderal dan komandan koalisi, dia adalah mantan Panglima Angkatan Darat Pakistan (GEO News, 2017). Ketua akan menyetujui aturan prosedural, anggaran tahunan dan peraturan pusat yang sudah di rundingkan dalam pertemuan tahunan. Pertemuan Perdana Menteri Dewan Pertahanan IMCTC akan bertemu setiap tahun dan pada waktu yang memiliki urgensi yang memiliki keterkaitannya dengan masalah terorisme. Dalam pertemuan ini juga akan diadakan pertemuan terkait menindaklanjuti strategi, kebijakan, rencana dan program untuk mencapai tujuan IMCTC.

Para menteri atau perwakilan yang menghadiri akan mengupayakan untuk mempromosikan aksi bersama dalam operasi, program dan inisiatif dalam kerangka koalisi Anti Terorisme Militer Islam dan sejalan dengan struktur dan mekanisme organisasi IMCTC (The Islamic Military Counter Terrorism Coalition. Media Center, 2017).

Berita terkait Palestina dan Israel di jalur Gaza sudah terjadi selama satu abad, dan belum memunculkan solusi sampai saat ini. Salah satu konflik terjadi karena kontrol wilayah dan memunculkan perselisihan seperti ditandai dengan penaklukan, penghancuran, dan balas dendam (Kapitan, 2015). Sampai 2018 ini korban terus bertambah oleh pasukan Israel di Gaza. Masalah ini akan ditindaklanjuti oleh aliansi IMCTC. Aliansi ini akan memulai memberikan bantuan dengan mengumpulkan pasukan copywriter dan editor dari negara-negara anggota untuk menargetkan Israel dengan kecaman bahan peledak (The Dependent, 2018).